



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DWIANA ANDAYANI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 231591

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 6.275.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
3. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 925.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/127 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 732.500.000**

1. MOBIL, HONDA HRV 1.5 LE CVT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 278.000.000
2. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T 125 CC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000
3. MOBIL, HONDA MINIBUS BR-V 1,5 L PRE-HS CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 267.000.000
4. MOBIL, HONDA MINIBUS BRIO SATYA 1,2 E CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 167.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 158.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 2.884.311.217****F. HARTA LAINNYA****Rp. ---**



Sub Total	Rp.	10.050.311.217
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.050.311.217

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.